

**ANALISA RASIO KEUANGAN APBD SEBAGAI TOLAK
UKUR PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA
PEMDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2007-2009**

Danang Prio Utomo

STKIP Hamzanwadi Selong, email: danang_irenk@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2007-2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007-2009. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, aktivitas (keserasian), Debt Service Coverage Ratio dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ada sebagian besar rasio selama tiga tahun mengalami fluktuasi, untuk rasio kemandirian di Kabupaten Lombok Timur masih rendah sekali dengan rata-rata 5,12 dan tiap tahunnya mengalami penurunan. Rasio efektifitas mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan nilai rata-rata 98,59 dan efisiensi APBD yang mengalami fluktuasi pada Kabupaten Lombok Timur dikatakan efektif tetapi kurang efisien. Analisis rasio belanja rutin terhadap APBD cukup baik dengan nilai 78,85. Analisis rasio belanja pembangunan terhadap APBD berada pada kategori cukup baik dengan nilai 20,28. *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berada di atas DSCR minimal yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,5. Pertumbuhan PAD Kabupaten Lombok Timur sebesar 6,68 % berada pada kategori sangat rendah.

Kata kunci: Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan

ABSTRACT

This research is aimed at finding out the capability of East Lombok government in taking care of the district's monetary based on the district's income and budget plan (APBD) from 2007 until 2009.

The design of this research is comparative research. The data used in this research is the report of the district's income and budget plan from 2007 until 2009. The instruments used in this research to analyze the data are the independent ratio, effective and efficiency of the district's income and budget plan, the activities, debt service coverage ratio and the growth of district's real income ratio.

The research revealed that most of the ratio in three years time fluctuated, the independent ratio in East Lombok is low around 5,12 and decreases each year. The effective ratio increases each year and the average is around 98, 59, while the efficiency of the district's income and budget plan which fluctuated was considered effective but not efficient. The analysis of the routine outcome to the district's income is in good category with 78,85 score. The analysis of the development outcome to the district's income is in good category with 20,28 score. The government's debt service coverage ratio is above the fixed minimum DSCR 2.5. The growth of East Lombok's true income (PAD) is very low at 6,68 % growth.

Key words: financial ratio of APBD, financial performance

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara aplikatif misi kedua UU ini adalah dilaksanakannya desentralisasi yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu pertama, mendorong meningkatkan partisipasi, prakarsa masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang ada dimasing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Pembaharuan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan anggaran ini dituangkan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksanaan antara lain :

1. PP Nomor 106 tahun 2000 pengelolaan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. PP Nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
3. PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
4. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Untuk menjamin dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dibutuhkan tidak hanya pengawasan internal yang melibatkan aparat pengawasan fungsional daerah tetapi juga dibutuhkan pengawasan eksternal yang mendasar dengan meningkatkan peran DPRD dan masyarakat luas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah, karena nantinya pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD.

Didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, APBD sebagai instrumen kebijakan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena:

1. APBD merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. APBD diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedang sumberdaya yang ada terbatas. APBD diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumberdaya, pilihan dan *treade off*.

3. APBD diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hasil ini APBD merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah.

Pentingnya APBD sebagai instrumen kebijakan yang utama perlu mendapat perhatian baik oleh masyarakat dan DPRD melalui penguatan fungsi pengawasan dengan cara optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*Balance Power*) dan partisipasi masyarakat baik langsung maupun secara tidak langsung sebagai bentuk sosial kontrol. Pengawasan mengacu kepada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2002: 213).

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dimana hasil analisa rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasi pendapatan daerah.
3. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
4. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Widodo dalam (Abdul Halim, 2001: 261) penggunaan analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan cara: "membandingkan hasil yang dicapai satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui

kecenderungan yang terjadi, selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan pemerintah daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lain”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2009”.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komperatif. Penelitian Komperatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan variabel-variabel yang diteliti dengan tujuan dapat menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 1994:6). Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur.

1. Alat Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur. Adapun Prosedur analisisnya sebagai berikut :

a. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan palayanan kepada mayarakat yang telah membayar pajak dan retrebusi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}}$$

Menurut Mardiasmo, 2001 dalam (Nataludin:69) kriteria kemandirian.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan

Kreteria kemandirian keuangan	% Kemandirian
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

b. Menghitung Rasio efektifitas dan efisiensi APBD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan/ penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Re alisasi Penerimaan / Pendapa tan Daerah}}{\text{T arg et Penerimaan / Pendapa tan yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kriteria kinerja keuangan yang efektif menurut Medi, 1996 adalah :

Tabel 2. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Kriteria	% Efektifitas
Sangat Efektif	Keatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang 60%

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya / Pengeluaran Daerah}}{\text{Re alisasi Penerimaan Daerah}}$$

Kriteria kinerja keuangan yang efisien menurut Medi, 1996 adalah :

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria	% Efektifitas
Tidak Efisien	Keatas 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang 60%

c. Menghitung rasio aktifitas

Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja}}$$

Menurut Mardiasmo, 1999 dalam (Widodo:65) Kriteria tingkat belanja rutin dapat dinilai sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria Tingkat Belanja Rutin

Kriteria	% Tingkat Belanja Rutin
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% - 80%
Kurang Baik	80% - 100%

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja}}$$

Tabel 5. Kriteria Tingkat Belanja Pembangunan

Kriteria	% Tingkat Belanja Rutin
Kurang Baik	0% - 10%

Cukup Baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

d. Menghitung *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah menggunakan sumber dana yang lain selain pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana yang lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angguran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

Keterangan :

PAD = *Pendapatan Asli Daerah*

BD = *Bagian Daerah dari PBB*

DAU = *Dana Alokasi Umum*

BW = *Belanja Wajib*

e. Menghitung rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hal ini bermanfaat untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Menurut Anto Dajan (dalam Armayani, 2001 : 21) pertumbuhan dapat dinilai dengan formulasi dan kriteria sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = *PAD tahun ke-n*

P_o = *PAD tahun ke- n-1*

Tabel 6. Kriteria Tingkat Pertumbuhan

Kriteria	% Tingkat Pertumbuhan
Sangat rendah	0% - 10%
Rendah	11% - 20%
Sedang	21% - 30%
Tinggi	Diatas 40%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Penerimaan Daerah

Sebagaimana telah kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam pengelolaan APBD harus mengacu pada norma dan prinsip; transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran.

Untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 79 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 3 dan 4 dikatakan bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Adapun besarnya kontribusi penerimaan daerah dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2007-2009 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007-2009

No	Komponen Pendapatan	Tahun Anggaran		
		2007	2008	2009
1	PAD	33.742.033.869,36	34.904.413.611,26	39.030.491.599,90
2	Dana Perimbangan	618.504.503.053,00	684.138.994.457,00	724.541.275.996,00
3	Pinjaman Daerah	-	-	-
4	Pendapatan Lain- lain	21.190.374.000,00	13.049.367.700,00	61.570.935.300,79
Pendapatan		673.436.910.922,36	732.092.775.768,26	825.142.702.896,69

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Lombok Timur

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ketahunnya. Proporsi terbesar dalam pembentukan pendapatan daerah didominasi oleh Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam membiayai pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan masih memiliki ketergantungan yang besar dari pemerintah pusat.

Adapun kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2007-2009

Tahun	Rencana	Realisasi	%
2007	708.358.016.197,00	682.483.974.846,95	96,35
2008	759.556.792.121,00	746.317.158.555,19	98,26

2009	815.735.588.617,00	825.142.702.896,69	101,15
------	--------------------	--------------------	--------

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Lombok Timur

Berdasarkan tabel di atas secara umum pencapaian target penerimaan daerah selama tahun anggaran 2007-2009 menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Perkembangan Pengeluaran Daerah

Berdasarkan penetapan target penerimaan daerah sebagaimana dijelaskan di atas untuk mendistribusikan hasil penerimaan tersebut maka ditetapkan pula pengalokasiannya dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Adapun terget dan realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Rencana dan Realisasi Pengeluaran Daerah

Jenis Belanja	Ket.	Tahun Anggaran		
		2007	2008	2009
Belanja Rutin	Rencana	491.427.071.548,00	591.635.291.085,00	693.285.113.546,00
	Realisasi	462.497.721.898,70	570.609.135.661,00	658.698.791.105,00
	%	95,35	96,64	94,56
Belanja Pembangunan	Rencana	188.387.140.899,00	153.134.292.137,00	108.562.940.655,00
	Realisasi	175.221.865.516,00	144.557.041.373,00	102.783.653.103,00
	%	93,01	94,40	94,68
Total Belanja APBD	Rencana	679.814.212.447,00	744.769.583.222,00	823.693.974.201,00
	Realisasi	637.719.587.414,70	715.166.177.034,00	781.962.936.696,00
	%	93,81	96,03	94,93

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Lombok Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui secara umum peningkatan yang cukup berarti terjadi pada belanja rutin dari tahun ketahunnya. Sedangkan belanja pembangunan mengalami penurunan tiap tahun. Peningkatan yang

terjadi pada tiap tahun pada belanja rutin berdampak pada penurunan jumlah belanja pembangunan. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan pada perubahan sistem anggaran yang lebih menekankan kepada peningkatan dan pencapaian tingkat pelayanan diberbagai bidang kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan Rasio keuangan pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009. Dalam analisis ini terlebih dahulu dilakukan perhitungan terhadap.

1. Analisis Perkembangan Rasio

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diketahui perkembangan rasio keuangan APBD pada Kabupaten Lombok Timur tahun Anggaran 2007-2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (dalam %)

No.	Jenis Rasio	Tahun Anggaran		
		2007	2008	2009
1.	Rasio Kemandirian	5,35	5,04	4,97
2.	Rasio Efektifitas	96,35	98,26	101,15
3.	Rasio Efisiensi	93,44	95,83	94,77
4.	Rasio Aktivitas (Keserasian)			
	- Rasio Belanja Rutin Terhadap ABPD	72,52	79,79	84,24
	- Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD	27,48	20,21	13,14
5.	Debt Services Coverage Ratio	7,95	3,22	4,41
6.	Rasio Pertumbuhan PAD	4,77	3,44	11,82

Sumber : Lampiran 4, 5, 6, 7 dan 8 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dihitung pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing rasio dalam tabel berikut ini :

Tabel 11. Pertumbuhan Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) (dalam %)

No.	Jenis Rasio	Tahun Anggaran		
		2007	2008	2009
1.	Rasio Kemandirian	0	- 5,65	- 0,80
2.	Rasio Efektifitas	0	1,98	2,94
3.	Rasio Efisiensi	0	2,56	- 1,11
4.	Rasio Aktivitas (Keserasian)			
	- Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD	0	10,02	5,58
	- Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD	0	- 26,46	- 34,98
5.	Debt Services Coverage Ratio	0	- 59,50	36,96
6.	Rasio Pertumbuhan PAD	0	- 27,88	243,60

Sumber : Lampiran 9 (data diolah)

Berdasarkan tabel 10 dan 11 di atas dapat diketahui pertumbuhan dan kecenderungan yang terjadi pada rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2008 terdapat empat (4) jenis rasio yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan tiga (3) rasio yang mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan yang positif pada rasio efektifitas sebesar 1,98%, pada rasio efisiensi sebesar 2,56% dan rasio belanja rutin sebesar 10,02%.

Pada tahun 2009 penurunan terjadi pada tiga (3) jenis rasio yakni rasio Kemandirian, rasio efisiensi dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD sedangkan peningkatan untuk rasio yaitu rasio efektifitas, belanja rutin terhadap APBD, *Debt Services Coverage Ratio*, dan pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun sebelumnya. Dimana peningkatan terbesar terjadi pada rasio pertumbuhan PAD sebesar 243,60%.

Pertumbuhan rasio keuangan APBD selama tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan yang hampir mendekati nilai positif pada tahun 2009. dari sisi efektifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun pada sisi efisiensi mengalami penurunan pada tahun 2009 hingga mencapai angka negatif. Dari sisi rasio aktivitas pertumbuhan belanja rutin mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan penurunan pada tahun 2009 sedangkan pada rasio belanja pembangunan hanya mengalami penurunan tiap tahunnya. *Debt Services Coverage Ratio* mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2008 namun pada tahun 2009 peningkatan. Dari sisi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang cukup drastis.

2. Analisis Komparasi Per Rasio Keuangan

Tabel 12. hasil perhitungan rasio Keuangan (dalam %)

No.	Jenis Rasio	Tahun Anggaran			Rata-rata	Kriteria
		2007	2008	2009		
1.	Rasio Kemandirian	5,35	5,04	4,97	5,12	Rendah sekali
2.	Rasio Efektifitas	96,35	98,26	101,15	98,59	Efektif
3.	Rasio Efisiensi	93,44	95,83	94,77	94,68	Kurang efisien
4.	Rasio Belanja Rutin	72,52	79,79	84,25	78,85	Cukup baik
5.	Rasio Belanja Pembangunan	27,48	20,21	13,14	20,28	Cukup baik
6.	DSCR	7,95	3,22	4,41	5,19	-
7.	Pertumbuhan PAD	4,77	3,44	11,82	6,68	Sangat rendah

Sumber : Lampiran 4, 5, 6, 7 dan 8 (diolah)

a. Analisis Rasio Kemandirian

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin

besar nilai rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam lampiran 4 maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah selama tahun anggaran 2007-2009 masih rendah sekali dan tiap tahunnya mengalami penurunan.

b. Analisis Rasio Efektifitas

Analisis rasio efektifitas APBD dilakukan untuk mengetahui perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan/ penerimaan daerah yang direncanakan dibanding target yang ditetapkan. Semakin besar nilai rasio efektifitas menunjukkan semakin baiknya efektifitas kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan/ penerimaan yang direncanakan.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam lampiran 5 maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas menggambarkan efektifitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria efektif (<100%) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima.

c. Analisis Rasio Efisiensi

Analisis rasio efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan/ pendapatan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah menunjukkan semakin baiknya kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditunjukkan dengan semakin tingginya derajat efisiensi yang

dicapai, sebaliknya bila semakin tinggi nilai rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah berarti menunjukkan kurang efisiensinya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 5, maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas menunjukkan masih kurang efisien dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2007-2009 dengan tingkat kriteria 94,68% yang tiap tahunnya mengalami fluktuasi.

d. Analisis Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran aktifitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja rutin secara optimal. Kinerja pemerintah dinilai baik berdasarkan rasio ini apabila persentase rasio belanja rutin terhadap APBD bernilai $<40\%$.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 6, maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas yang menunjukkan persentase alokasi dana belanja rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Lombok Timur selama tahun Anggaran 2007-2009 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan presentase 78,85% yang tiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga H_0 ditolak H_a diterima.

e. Analisis Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran prioritas alokasi dana pada belanja pembangunan secara optimal oleh pemerintah daerah. Kinerja pemerintah dinilai baik berdasarkan rasio ini apabila persentase alokasi dana belanja pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah $>40\%$. Semakin besar nilai rasio belanja pembangunan menunjukkan semakin besarnya alokasi dana

yang ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 6, maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas menunjukkan persentase alokasi dana pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2007-2009 menunjukkan persentase yang cukup baik yaitu 20,28% dan tiap tahunnya mengalami penurunan.

f. *Analisis Debt Service Coverage Ratio*

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam menutupi atau membayar pinjaman maupun bunga pinjaman sebagai alternatif sumber dana lain. Pinjaman dapat dilakukan sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 7, maka dapat dilihat pada tabel 12 diatas menunjukkan rata-rata *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berada di atas DSCR minimal yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,5. Apabila DSCR bernilai 0, itu disebabkan tidak pernah dilakukan pinjaman selama tahun anggaran tersebut. Sedangkan pada Kabupaten Lombok Timur dari tahun anggaran 2007-2009 mengalami fluktuasi dan menunjukkan hasil di atas 2,5 yakni 5,19.

Tabel 13. Kemampuan Peminjaman yang Dapat Dilakukan

Tahun	Batas Maksimal Pinjaman dan Bunga
2007	38.158.075.609,60
2008	10.960.656.042,80
2009	16.308.764.716,00

Rata-rata	21.809.165.456,10
------------------	--------------------------

Sumber : Lampiran 7 (diolah)

Berdasarkan tabel 13 di atas diketahui jumlah pinjaman, bunga, dan biaya pinjaman yang dapat dilakukan tiap tahunnya. Pada tahun 2007 merupakan batas maksimal pinjaman dan bunga yang tertinggi dibanding dengan tahun selanjutnya.

g. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dicapai dari periode keperiode berikutnya. Semakin tingginya nilai rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menunjukkan semakin baiknya kinerja pemerintah dalam mempertahankan, menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai komponen utama penerimaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada lampiran 8, maka dapat dilihat pada tabel 12 di atas menunjukkan sangat rendahnya pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2007-2009 pada Kabupaten Lombok Timur. Meskipun pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 11, 82% tetapi belum bisa mencapai > 30%.

B. Pembahasan

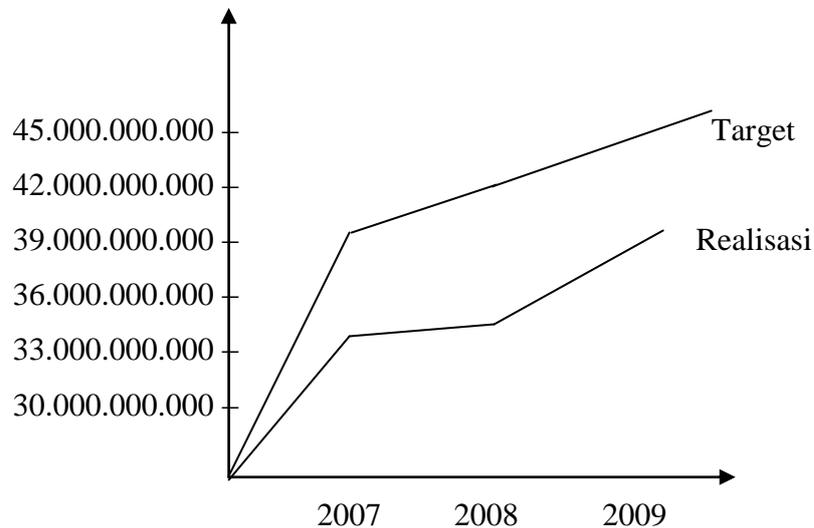
Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa sangat rendahnya tingkat kemandirian keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur disebabkan kurangnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, hal ini dibuktikan oleh realisasi retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selalu lebih rendah dari targetnya dari tahun anggaran 2007-2009, sehingga dalam

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih sangat tergantung dengan Pemerintah propinsi/pusat. ini terbukti dari tabel dan grafik di bawah :

Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah 2007-2009

Tahun	Retribusi Daerah		Lain-lain PAD yg sah		PAD	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2007	17.622.543.125	15.437.841.596	12.464.933.850	9.791.450.500	39.655.168.105	33.742.033.869
2008	19.499.375.185	17.824.451.144	11.830.670.790	7.488.585.162	42.016.545.975	34.904.413.611
2009	21.402.475.185	19.206.775.206	9.855.610.790	6.756.063.493	44.016.545.975	39.030.491.600

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Lombok Timur



Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah 2007-2009

Berdasarkan rasio efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kinerja pemerintah daerah Lombok Timur dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2007-2009 dapat dikatakan efektif terlihat pada penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat – dana perimbangan yang terealisasi hampir mendekati target yang dicapai sedangkan lain-lain pendapatan yang sah melebihi target yang diinginkan. Rasio efisiensi pada anggaran APBD kinerja pemerintah dari analisis yang dilakukan dikatakan

kurang efisien karena pengeluaran APBD hampir mendekati pendapatan yang diterima pemerintah. Hal ini terbukti pada tabel di bawah :

Tabel 15. Penerimaan dan Pengeluaran APBD 2007-2009

Tahun Anggaran	Rencana Penerimaan APBD	Realisasi Penerimaan APBD	Pengeluaran APBD
2007	708.358.016.197,00	682.483.974.846,95	637.719.587.414,70
2008	759.556.792.121,00	746.317.158.555,19	715.166.177.034,00
2009	815.735.588.617,00	825.142.702.896,69	781.962.936.696,00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Lombok Timur

Berdasarkan rasio aktivitas (keserasian), apabila dilihat dari rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap APBD menunjukkan hasil yang cukup baik ini disebabkan karena belanja rutin yang berasal dari belanja operasi dan belanja tak terduga lebih besar daripada belanja pembangunan yang berasal dari belanja modal. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 16. Belanja APBD 2007-2009

Jenis	Uraian	Tahun		
		2007	2008	2009
Belanja Rutin	Belanja Operasi	462.107.301.299	568.500.167.661	678.204.283.593
	Belanja Tak Terduga	390.420.600	2.108.968.000	975.000.000
	Belanja Pembangunan	Belanja Modal	175.221.865.516	144.557.041.373
Total Belanja		637.719.587.4145	715.166.177.034	781.962.936.696

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA)
Lombok Timur

Berdasarkan *Debt Service Coverage Ratio* Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berada di atas DSCR minimal yang telah ditetapkan. Maka dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mampu menutupi atau membayar pinjaman maupun bunga pinjaman selama tahun anggaran 2007-2009. Dapat dilihat pada jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari

jumlah penerimaan umum APBD. Ketentuan jumlah komulatif ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap paling layak menjadi beban APBD. Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah.

Berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dikategorikan sangat rendah dikarenakan PAD yang terealisasi lebih kecil daripada target yang diinginkan, dengan begitu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur masih belum dapat dikatakan berhasil karena belum mampu memberdayakan sektor yang potensial dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dalam periode tahun 2007-2009. Selain itu juga disebabkan karena masih rendahnya Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, maka dapat diketahui tolak ukur kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan rasio keuangan APBD sehingga dapat ditarik kesimpulan. Apabila dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektifitas APBD rasio efisiensi APBD, rasio aktivitas (keserasian), *Debt Services Coverage Ratio* dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah maka pengelolaan keuangan di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan kemandirian keuangan yang sangat rendah. Tingkat kemampuan peminjaman yang cukup baik yang melebihi batas minimal 2,5 dan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sangat rendah.

Dari hasil temuan tersebut di atas maka disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
 - a. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu melakukan upaya-upaya intensifikasi berupa optimalisasikan retribusi daerah serta memberikan

- sangsi yang tegas bagi yang tidak memenuhi kewajibannya dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dan masih sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan eksistensi daerah melalui kemandirian dalam bidang pendanaan.
- b. Perlunya pendataan perhitungan potensi sumber-sumber pendapatan daerah, agar lebih realistis. Hal ini berguna bagi daerah dalam meningkatkan konsistensi efektifitas pengelolaan APBD.
 - c. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana perekonomian yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur dapat melakukan peminjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu DSCR minimal 2,5
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama diharapkan untuk bisa lebih baik dari peneliti-peneliti sebelumnya dengan tetap mengupayakan pendekatan yang berbeda, baik dari segi prosedur maupun teori-teori yang menunjang penulisnya.

DAFTAR PUSKATA

- Alwi, Syafaruddin, (1993), *Alat-alat dalam Pembelajaran*, Yogyakarta, ANDI Offset.
- Arikunto, Suharsimi., (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra, (2001), *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta, BPFE
- Boediono dan Kaster, Wayan. (2004), *Statistika dan Probabilitas*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Halim, Abdul, (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

- Halim, Abdul, (2002), *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba empat.
- Harapap, Sofyan Syafari, (1999), *Akuntansi Keuangan atas Laporan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, dkk, (2004), *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafien.
- Kitab Perundangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah*, Pusat Indo Data Indo (PIDI).
- M. Hakkumulloh, (2010), *Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) "Setia Utama" di Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur tahun 2005-2009*, Skripsi STKIP Hamzanwadi Selong.
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, ANDI Offset.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI Offset.
- Medi, (1996), *Analisis Efektifitas Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Jakarta, Rineka cipta.
- Munawir, S, (1995), *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta, Liberty
- Munir, Badrul, (2003), *Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*, Yogyakarta, Samawa Center.
- Munir, H Dasril, dkk, (2004), *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, YPAPI
- Muslich, Mohamad, (2000), *Manajemen Keuangan Modern*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nasution, Ebed, (2003), *Analisis Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah serta Kontribusi Dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat, Tahun 1995/1996-1999/2000*
- Sawir, Agnes, (2001), *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, (1994), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, ALFABETA.
- Suprihatin, Amin, (2008), *Otonomi Daerah dari Masa Kemasa Cetakan I*, Klaten, Cempaka Putih.

Danang Prio Utomo

Usman, Husnaini, (1995), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

Zaki, Baridwan, (1990), *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta, BPFPE.